

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1994, Amerika Serikat dan Iran telah memiliki hubungan yang serupa dengan negara-negara lain yang telah mengembangkan kerja sama bilateral, namun di bawah kepresidenan George Walker Bush, keamanan nasional Amerika Serikat berada dalam bahaya karena adanya serangan 9/11, yang mendorong Bush untuk meningkatkan keamanan nasional dan menyatakan perang terhadap semua organisasi teroris. (Rachmadiani et al., 2012). Pada saat ini juga Bush akhirnya memberikan Iran label negara yang masuk dalam kategori *Rogue State* yang diartikan sebagai negara menyimpang dan tidak mematuhi aturan dan hukum Internasional. Bush menentang pengembangan nuklir Iran karena menganggap Iran sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Amerika. Bush khawatir jika Iran mengembangkan program nuklirnya, Iran akan menguasai negara-negara di Timur Tengah dan mengurangi pengaruh Amerika (Andini, 2017).

Sikap Amerika terhadap pengembangan nuklir Iran berasal dari ketidakmampuan Iran untuk melakukan transparansi nuklirnya. Amerika hanya ingin Iran menunjukkan bahwa program nuklirnya diciptakan untuk tujuan damai dan instruktif. Selain itu, Amerika khawatir jika Iran memiliki senjata nuklir, maka mereka akan mentransfernya ke organisasi teroris, yang diyakini akan mengubahnya menjadi teror nuklir. Amerika mendasarkan keyakinan ini pada dukungan pemerintah Iran terhadap organisasi teroris yang membuat Bush menetapkan kebijakan menentang negara-negara yang memiliki atau berupaya memperoleh senjata nuklir. Dalam hal ini, Bush akhirnya menawarkan Iran sebuah pilihan sebagai imbalan di bidang diplomasi, ekonomi dan keamanan jika Iran mau transparan atas kegiatan pengembangan nuklirnya (Andini, 2017).

Bersama dengan beberapa negara lain, Amerika Serikat dan Iran memiliki perjanjian nuklir dengan negara-negara yang disebut P5+1 yaitu sekelompok negara yang terdiri dari Jerman dan lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (U.S Department Of State, 2019). Amerika,

Iran serta negara P5+1 ini memiliki perjanjian nuklir bernama *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) yang disepakati pada 14 Juli 2015. Perjanjian ini memiliki tujuan utama untuk memastikan program nuklir Iran tetap damai dan tidak digunakan untuk pengembangan senjata nuklir (U.S Department Of State, 2019).

Menurut *International Atomic Energy Agency* (IAEA), perjanjian ini mencakup beberapa komitmen utama dari Iran termasuk:

1. Pengurangan cadangan uranium: Iran setuju untuk mengurangi cadangan uranium yang diperkaya dengan tingkat rendah hingga 98% dan menghancurkan cadangan uranium yang diperkaya dengan tingkat sedang
2. Pembatasan pengayaan uranium: Iran hanya diperbolehkan memperkaya uranium hingga 3,67% selama 15 tahun
3. Pengurangan Sentrifugal: Iran setuju untuk mengurangi jumlah sentrifugal gas yang dimilikinya selama 13 tahun
4. Penghentian pembangunan reactor air berat: Iran tidak akan membangun reaktor air berat baru selama periode yang sama

Sebagai imbalannya, Iran akan menerima bantuan ekonomi dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, serta pengurangan sanksi dari Dewan Keamanan PBB (Amano, 2017).

Proses pengambilan keputusan suatu negara tidak mungkin dipisahkan dari sifat para pemimpinnya. Istilah "konsep idiosinkratik" mengacu pada diskusi dalam studi hubungan internasional tentang bagaimana kebijakan atau proses pengambilan keputusan suatu negara dipengaruhi oleh sifat-sifat pemimpinnya. pembuatan kebijakan khusus menggambarkan cara-cara di mana kualitas-kualitas khas seorang pemimpin mempengaruhi pilihan-pilihan yang mereka buat. Ini dapat mencakup pandangan dunia, pengalaman hidup, gaya kepemimpinan, dan nilai-nilai pribadi mereka (Putri & Olifiani, 2022).

Seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan konfrontatif dan keras mungkin lebih cenderung mengambil sikap keras terhadap negara lain dalam urusan

internasional. Sebaliknya, pemimpin yang lebih kolaboratif dan diplomatis akan menyukai strategi yang memerlukan kompromi dan negosiasi. Gagasan aneh ini menjelaskan mengapa, meskipun kondisi hipotetisnya sama, seorang pemimpin suatu negara membuat penilaian atau kebijakan yang berbeda dengan pemimpin negara lain (Mintz & DeRouen, 2010).

Pada masa kepemimpinan Trump dapat dikatakan Amerika Serikat memutuskan untuk melepas hubungan negaranya dengan Iran dimana Amerika Serikat tidak memberikan sertifikasi ulang kesepakatan nuklir Iran yang pernah dibuat sebelumnya pada masa kepemimpinan Obama, keputusan inilah yang menandai peristiwa penting dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Iran yang sebelumnya juga diketahui penuh dengan ketidakpercayaan dan aksi saling tuduh.

Trump sendiri berasal dari partai Republik mana setelah partai demokrat, partai ini merupakan organisasi politik tertua kedua di AS. GOP atau *Grand Old Party*, adalah nama lain dari Partai Republik. Dibandingkan Partai Demokrat, Partai Republik di AS lebih condong konservatif. Partai ini sering dianggap sebagai partai yang lebih konservatif dalam politik Amerika. Partai Republik biasanya menyukai keringanan pajak bagi dunia usaha, kebijakan yang pro-bisnis, dan peran pemerintah yang lebih kecil dalam perekonomian. Mereka juga menyoroti kekuatan militer dan kepentingan nasional Amerika Serikat (E. Indonesia, 2023). Hal ini terbukti dari pengambilan kebijakan Donald Trump yang kontroversial dimana Trump juga menarik Amerika Serikat dari perjanjian nuklir dengan Iran dan menerapkan kembali sanksi ekonomi yang dibebaskan ketika kesepakatan itu ditandatangani pada 2015 (Rahmawati, 2020). Saling serang dan saling tuduh juga kerap dilakukan oleh pemimpin kedua negara, Iran pernah menembak jatuh pesawat tanpa awal Amerika Serikat yang diduga terbang diatas wilayah udaranya (BBC, 2020).

Keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir pada 9 Mei 2018 merupakan sebuah keputusan sepihak yang tidak melibatkan anggota penandatanganan kesepakatan lainnya. Kesepakatan nuklir ini dipandang oleh Negara lain sebagai cara terbaik untuk mencegah Iran menjadi Negara yang memiliki kekuatan nuklir

meskipun kesepakatan ini masih belum sempurna. Selain itu, Kesepakatan Nuklir Iran sekarang berada dalam bahaya karena Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian tersebut, sehingga mengharuskan negara-negara penandatanganan lainnya diusahakan untuk melindungi Iran dari sanksi yang telah diterapkan kembali oleh AS. Iran, di sisi lain, juga melakukan upaya yang lebih besar untuk menegaskan kembali posisinya bahwa negosiasi kesepakatan nuklir Iran kini telah selesai.

Setelah Joe Biden terpilih menjadi presiden Amerika Serikat, terdapat beberapa perubahan kebijakan yang diambil Amerika Serikat terhadap Iran. Biden sendiri merupakan seorang yang berasal dari partai demokrat. Partai ini didirikan sebagai saingan dari kelompok politik yang berkuasa di AS saat itu. Partai ini pertama kali dianggap mendukung segregasi ras dan perbudakan. Namun partai ini berkembang menjadi partai liberal dan progresif pada abad ke-20. Partai ini mengadvokasi hak-hak perempuan, hak-hak sipil, dan hak-hak minoritas lainnya. Partai Demokrat mengambil sikap yang lebih liberal dan mengalami pergeseran ideologi. Partai ini beralih ke sikap yang lebih progresif di abad ke-20 dalam berbagai hal termasuk kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan, dan hak-hak sipil. Partai Demokrat terkenal dengan gagasan ekonomi progresifnya, termasuk memperluas peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi (E. Indonesia, 2023).

Hal ini dapat dilihat dimana Biden memulihkan keringanan sanksi terhadap Iran untuk memungkinkan proyek kerjasama nuklir Internasional. Hal ini didorong karena adanya pembicaraan kesepakatan nuklir yang hampir mencapai tahap akhir. Departemen Luar Negeri mengaku telah mengirim laporan keringanan tersebut kepada Kongress. Laporan ini menjelaskan bahwa memulihkan keringanan ini akan membantu pembicaraan di Wina untuk kembali ke kesepakatan nuklir JCPOA (*Joint Comprehensive Plan of Action*) yang sebelumnya dicapai antara Iran dan China, Prancis, Jerman, Rusia dan Inggris pada 2015 lalu (Abdillah, 2019).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka, identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu Amerika Serikat yang

menetapkan sanksi ekonomi terhadap Iran yang sedang membangun fasilitas nuklirnya dan Amerika Serikat yang menganggap jika program nuklir Iran sebagai ancaman negara.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang akan dilakukan lebih terfokus pada masalah yang ingin dipecahkan dimana penelitian ini menitikberatkan pada tinjauan idiosinkratik Donald Trump dan Joe Biden dalam pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Iran yang melakukan program pengembangan nuklir.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji sesuai dengan tema yaitu Bagaimana idiosinkratik Donald Trump dan Joe Biden berperan dalam pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap pengembangan nuklir Iran?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran idiosinkratik Donald Trump dan Joe Biden dalam pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap pengembangan nuklir Iran.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dalam kajian hubungan internasional dan memperluas pengetahuan terkait dengan idiosinkratik yang dapat mempengaruhi individu dalam mengambil kebijakan, yang mana dalam penelitian ini menganalisis idiosinkratik Donald Trump dan Joe Biden dalam pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap pengembangan nuklir Iran.